

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas, ialah menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan suatu usaha, dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuannya. Secara ideal efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti.¹

Efektivitas menurut H. Emerson adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Kamus Bahasa Indonesia efektivitas, (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar efektif (kata sifat) yang mengandung beberapa pengertian antara lain:

1. Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya dan kesannya)
2. Manjur atau mujarab
3. Dapat membawa hasil, berhasil guna
4. Mulai berlaku (undang-undang, atau peraturan)²

Dari pengertian di atas maka dapat digambarkan bahwa efektivitas adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan hasil usaha, karena tercapainya sasaran suatu tujuan yang dicapainya secara ideal dan efisien, sehingga pengaruhnya

¹ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van-Hove, 2003), 883.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 284.

dinyatakan berhasil dengan ukuran-ukuran manjur dan mujarab dalam membawakan hasil yang memuaskan.

Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif. Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly, menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut :

1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input.
3. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Keunggulan adalah tingkat dimana korganisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
5. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Menurut pendapat Richard M. Steers menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu

8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.³

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektivitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektivitas adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

B. Konsep Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari kata *managio* yang berarti pengurusan atau *managiare* yaitu melatih dalam mengatur langkah-langkah, atau dapat juga berarti *getting done through other people*. Ada juga yang berpandangan lain bahwa dari sudut istilah, manajemen berasal dari *manage*. Kata ini, berasal dari Italia; *managgiare* yang secara harfiah berarti menangani atau melatih kuda, secara maknawi berarti memimpin, membimbing, atau mengatur.⁴

Sedangkan kata manajemen jika ditinjau dari segi terminalogi, maka para ahli berbeda pendapat dalam mengartikan sesuai dengan latar belakang dan sudut pandang mereka masing-masing Pada kenyataannya

³ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1980), 46-48.

⁴ Amiruddin Siahaan, dkk, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2006), 121.

manajemen sulit didefinisikan karena tidak ada definisi manajemen yang diterima secara universal.

Definisi manajemen yang sering dikemukakan adalah “ *Management as the art getting things done through people*” artinya manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Mary Parket Follet mendefinisikan manajemen adalah suatu seni, karena dengan melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus. Seperti yang diungkapkan oleh Sahertian sebagaimana dikutip Ali Imron bahwa dalam manajemen terkandung dua makna, yaitu *Mind* (pikir) dan *action* (tindakan).⁵ Sedangkan menurut Muhaimin, manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan sumber secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.⁶

Untuk memberikan pengertian manajemen, M. Ngalim Purwanto mengutip tiga pendapat tokoh manajemen sebagai berikut:⁷

- a. Manajemen menurut Arifin Abdurrahman adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksana. Jadi dalam hal ini manajemen adalah pengelolaan orang-orang sebagai pelaksana.
- b. Menurut Dwight Waldo, manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan yang rasional dalam system adminitrasi.
- c. Menurut O, Donnal, manajemen adalah pencapaian sesuatu melalui sesuatu dan bersama-sama dengan orang-orang.

⁵ Fahim Tharaba, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Malang: Dream Litera Buana, 2016), 52.

⁶ Muhaimin, dkk, *Manajemen Pendidikan Aplikasinya Dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, (Kencana Prenada Media Grup, 2009), 4.

⁷ M. Ngalim, *Purwanto, Adminitrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 1.

Pada prinsipnya pengertian manajemen mengandung beberapa karakteristik yakni: 1) ada tujuan yang dicapai, 2) sebagai perpaduan ilmu dan seni, 3) merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif, dan terintegrasi dalam manfaatnya, 4) ada dua orang atau lebih dalam bekerja sama dalam organisasi, 5) didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab, 6) mencakup beberapa fungsi, 7) merupakan alat mencapai tujuan.⁸

Bedasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan dengan usaha-usaha para anggota organisasi dan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa antara manajemen dan pengelolaan pembiayaan pendidikan memiliki keterkaitan yang erat, guna pengelolaan pembiayaan pendidikan efektif dan efisien.

2. Manajemen dalam perspektif Islam

Rahmayulis sebagaimana dikutip oleh Saefullah menyatakan bahwa manajemen adalah *التدبير* (pengaturan).⁹ Kata *in* merupakan derivasi dari kata *دبر* (mengatur), sebagaimana terdapat dalam al-Quran dalam surah As-Sajadah :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مُقَدَّارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-

⁸ Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen; Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: Bumi, Aksara, 2001), 3.

⁹ Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Bandung, Pustakan Setia, 2012), 1.

Nya¹⁰ dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu” (QS. As-Sajadah: 5)

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwasanya Allah SWT merupakan yang menciptakan segala sesuatu, segala yang berkehendak dan segala pengatur alam, akan tetapi, manusia sebagai khalifah di bumi ini harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah SWT mengatur bumi ini.

Begitu juga dengan perkataan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, yaitu :

أَلْحَقُّ بِأَلَا نِظَامٍ يَعْلبُهُ الْبَاطِلُ بِنِظَامٍ

Artinya: “Kebenaran yang tidak terorganisasi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi.”

Ini menunjukkan, apabila ada perkara dalam suatu lembaga tidak di manajemenkan dengan baik padahal program ini sangat bermamfaat untuk kemaslahatan masyarakat misalnya, bisa terkalahkan dengan program yang hanya untuk menguntungkan personal seseorang. Oleh karena itu konsep manajemen dalam Islam pun yaitu perencanaan, perorganisasian, pergerakan pengawasan adalah *key word* (kunci) suatu program tercapai.

3. Manajemen *Entrepreneurship*

Dalam aspek manajemen *entrepreneurship* ini akan memaparkan proses manajemen dimulai dari *planning* (bagaimana direncanakan sebuah usaha), *organizing* (persiapan semua sumber daya untuk memulai usaha, *Executing* (Pelaksanaan usaha agar

¹⁰ Beritanya yang dibawa oleh malaikat, ayat ini suatu tamsil bagi kebesaran Allah dan keagungan-Nya. Syaamil, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 415.

mencapai tujuan), dan *Controlling* (mengawasi pelaksanaan usaha).

Aspek manajemen merupakan faktor yang terpenting. Di aspek inilah ide pengembangan usaha akan menjadi kenyataan di bawah kepemimpinan sebuah team manajemen. Manajemen *entrepreneurship* menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Bila usaha baru ingin berhasil, maka wirausaha harus memiliki kompetensi, di antaranya :¹¹

- a. Fokus terhadap kebutuhan pasar, bukan pada teknologi.
- b. Buat perencanaan anggaran keuangan, sampai dengan biaya-biaya produksi, penjualan dan adminitrasi.¹²
- c. Membangun tim manajemen, bukan menonjolkan perorangan (*not a "one person" show*).
- d. Memberikan peran kepada innovator.

Coulter membahas pada proses kewirausahaan sebagai suatu proses tahapan yang menyeluruh dari mulainya tahapan eksplorasi terhadap permasalahan-permasalahan yang memungkinkan adanya suatu harapan dan kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan, serta keunggulan kompetitif yang tentunya hanya diperoleh dengan kreatifitas dan inovasi untuk kemudian memutuskan untuk "*in action*" dalam kewirausahaan. Konsepsi proses kewirausahaan tersebut di ilustrasikan di bawah ini :

¹¹ Basrowi, *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 152.

¹² Suwinto Johan, *Studi Kelayakan Pengembangan* , 71.

Gambar 2.1
Entrepreneurial in Action-The Entrepreneurial Process



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa *exploring the entrepreneurial context* adalah sangat penting dalam proses *entrepreneurship*, karena dalam konteks *entrepreneurship* akan menjelaskan “*Rules of the game*” dan “*What decisions are likely to be succesfull*”. Setelah menentukan ini selanjutnya adalah proses implementasi fungsi manajemen.

a. *Planning* (perencanaan)

Setelah ide memulai usaha muncul, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan. Perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis (*blue print*) yang berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta keterampilan pengelolanya. Perencanaan usaha sebagai persiapan awal memiliki dua fungsi penting yaitu: 1) sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan usaha, dan 2) sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar.¹³

¹³ Basrowi, *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi...*, 103.

Planning dapat dirumuskan oleh T. Hani Handoko sebagai “pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa”.¹⁴ Suwinto Johan menyebutkan, jenis-jenis perencanaan yang harus disiapkan sebelum sebuah usaha dimulai, di antaranya ialah, digambarkan di bawah ini:¹⁵

Gambar 2.2
Tahapan Proses Perencanaan

Rencana pemasaran	Rencana Keuangan	Rencana Produksi	Rencana SDM
<ul style="list-style-type: none"> -Target pasar - Karakteristik produk -Strategi harga -Cara penjualan -Saluran distribusi -Strategi promosi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber pendanaan - Kelayakan secara keuangan - Proyeksi laba rugi 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Keperluan bahan baku - Bahan penunjang - Rencana hasil produksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana akan jumlah SDM yang diperlukan serta waktunya

Bedasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa terdapat empat jenis tahapan perencanaan, diberikan penjelasan sebagai berikut ini:

- 1) Rencana Pemasaran
Rencana ini berisi tentang target pasar, karakteristik produk, strategi harga, cara penjualan, saluran distribusi dan strategi promosi.
- 2) Rencana Keuangan
Rencana keuangan berisikan sumber pendanaan, kelayakan secara keuangan, proyeksi arus kas, proyeksi neraca, proyeksi laba rugi.
- 3) Rencana Produksi
Dalam rencana produksi akan dicantumkan mengenai rencana produksi, rencana keperluan bahan baku, bahan penunjang dan rencana hasil produksi.

¹⁴ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), cet. Ke-9.,77.

¹⁵ Suwinto Johan, *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis....*, 73.

4) Rencana Sumber Daya Manusia (*Man Power Planning*)

Rencana sumber daya manusia mencantumkan akan keperluan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dan waktu kapan diperlukannya.

Yusuf Suhardi menyatakan buatlah perencanaan termasuk jadwal waktunya secara sederhana. Mulai dari tugas bulan ini sampai dengan bulan dan tahun berikutnya. Perencanaan dapat dibuat jangka pendek, yaitu satu tahun, menengah yaitu lima tahun dan panjang yaitu dua puluh tahun. Perencanaan jangka panjang lebih umum, menengah lebih jelas, dan jangka pendek lebih bersifat teknis dari jangka menengah.¹⁶ Dengan demikian, pengusaha dapat mengendalikan secara terperinci yang ingin dicapai jangka panjang melalui tahunan dan lima tahunan. Perencanaan sangat berguna untuk memecahkan karena sempitnya waktu, juga dapat mengurangi tekanan dan ketegangan pekerjaan. Pengelolaan waktu adalah penting supaya semua pekerjaan dapat terlaksana seluruhnya.

b. *Organizing*

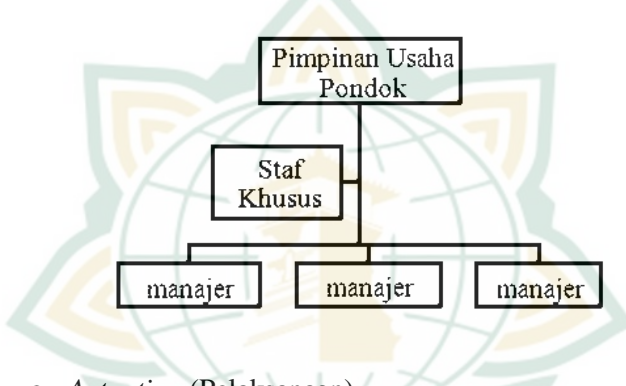
Organizing menyangkut pengorganisasian sumber daya yang terarah, sehingga tercipta sebuah team yang harmonis guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengorganisasi merupakan titik awal sebelum pelaksanaan. Dalam penelitian Nurbaiti menyebutkan,¹⁷ pengorganisasian yaitu: “penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi”. Dalam pengelolaan biaya pendidikan sebelumnya adanya aksi dari sebuah rencana, maka perlu diorganisasi terlebih dahulu sumber-sumber daya yang akan melaksanakan pengelolaan tersebut.

¹⁶ Yusuf Suhardi, *Kewirausahaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 102.

¹⁷ Nurbaiti, *Hubungan Antara Pengelolaan Biaya Pendidikan dengan Peningkatan Mutu Guru SMP PGRI 1 Ciputat*, (Jakarta: Manajemen Pendidikan, 2005), 13.

Pada tahap ini, manajemen mulai melakukan kegiatan implementasi sebuah usaha atau ide. Dalam tahapan ini, kepemimpinan menjadi faktor terpenting, bagaimana memotivasi, mengarahkan dan mengerakkan semua faktor organisasi yang ada untuk mencapai sasaran diinginkan.

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Team



c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Inti dari fungsi pengelolaan *entrepreneurship* adalah pada *actuating* yaitu, manajemen mulai melakukan kegiatan implementasi sebuah usaha atau ide. Dalam tahap ini, pemimpin menjadi faktor terpenting, bagaimana memotivasi, mengarahkan dan mengerakkan semua faktor organisasi bagian kinerjanya untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk dapat melihat keefektifan dari sebuah pengelolaan *entrepreneurship* dapat dilihat dari output yang memuaskan pada masing-masing hasil komponen unit usaha di lembaga pondok pesantren. Dalam hal ini, management memerlukan 4 keahlian untuk menunjukkan kinerja yang baik.¹⁸

¹⁸ Suwinto Johan, Studi Kelayakan *Pengembangan Bisnis...*, 77-78.

Gambar 2.4
Tahapan Prinsip Pengelolaan



- 1) Keahlian Konseptual, yaitu keahlian untuk mengerti dan menghubungkan semua aspek dan tugas dari *entrepreneurship*. Para kinerja berpikir sinergi, memiliki visi dan misi untuk melihat jangka waktu ke depan, mengantisipasi akan hal-hal yang bisa terjadi pada perusahaan.
 - 2) Keahlian Interpersonal, yaitu keahlian untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan dengan karyawan dan konsumen sehingga bisa mencapai tujuan *entrepreneurship*.
 - 3) Keahlian Teknis, yaitu keahlian untuk menjalankan tugas sehari-hari, seperti halnya sebagai pekerja produksi akan memiliki keahlian untuk menjalankan mesin dan memproduksi produk yang berkualitas.
 - 4) Keahlian Pengambilan Keputusan, yaitu keahlian untuk mempergunakan informasi yang telah tersedia, walaupun terbatas, untuk menentukan bagaimana lembaga bisa mempergunakan sumber daya yang ada dengan baik.
- d. *Controlling*

Controlling merupakan tahap akhir dari fungsi manajemen, dimana tujuannya adalah untuk mengukur, membandingkan, menilai kinerja, tingkat penggunaannya dan output yang dihasilkan. Dengan ini diharapkan melalui pengawasan dapat diketahui sejauh mana

tingkat efektifitas dan efisiensi dari manajemen *entrepreneurship* yang terlaksana.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan harus selalu diikuti dengan pengawasan atau perbandingan ke dalam rencana awal. Pelaksanaan akan selalu menimbulkan hal-hal yang belum diperkirakan dalam perencanaan awal, yang mana bisa menimbulkan biaya-biaya tambahan maupun risiko-risiko tambahan.¹⁹

Pengawasan dan pengantisipasi risiko menjadi fungsi manajemen yang terakhir. Beberapa organisasi besar membentuk beberapa bagian yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi organisasi seperti bagian internal control, audit dan juga bagian antisipasi resiko. Mengingat lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan sering terjadi perubahan yang sedemikian cepat, maka diperlukan strategi yang berjangka panjang dan dinamis pula. Untuk menghadapi kondisi yang dinamis (*hyper competitive*) seperti situasi sekarang ini, Richard A. D'Aveni dalam Muh. Yunus mengemukakan suatu ide dasar, bahwa setiap perusahaan harus menemukan pada strategi yang memfokuskan pada pengembangan kompetensi inti, pengetahuan dan keunikan *intangible asset* untuk menciptakan keunggulan. Oleh karena itu, D'Aveni mengajukan 7 keberhasilan perusahaan dalam persaingan *hypercompetitive* yang dengan "The New 7's" yaitu meliputi.²⁰

- 1) *Superior Stakeholder Satisfaction* : bahwa wirausaha harus mampu memberikan pelayanan superior yang memuaskan konsumen dan para stakeholders tanpa terkecuali, seperti: pemasok, karyawan, manajer, pemegang saham, pemerintah dan masyarakat sekitarnya)
- 2) *Strategic Soothsaying* : bahwa wirausaha harus memfokuskan strateginya pada sasaran, yakni

¹⁹ Suwinto Johan, *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis...*,78.

²⁰ Muh Yunus, *Islam dan Kewirausahaan Inovatif*, (Malang: UIN Press, 2008), 269-270.

harus mencari posisi yang tepat bagi produk-produk dan jasa-jasa yang dihasilkan.

- 3) *Positioning for Speed* : bahwa dalam usahanya harus membuat hasil yang mencengangkan dengan cara menghasilkan produk-produk yang baru dan unik serta memiliki nilai tambah baru yang menarik minat konsumen.
- 4) *Shifting the Role of the Game*: perusahaan harus mengubah pola-pola persaingan (bervariasi) dengan pola-pola baru yang berbeda.
- 5) *Signaling Strategic Intent* : bahwa inter dan antar personal dalam suatu perusahaan harus menjadi hubungan kedekatan. Karena kedekatan dengan karyawan, relasi dan konsumen sangatlah ampuh untuk meningkatkan kinerja usaha.

Simultaneous and Sequential Strategic Thrusts: bahwa perusahaan perlu mengembangkan faktor-faktor pendorong atau penggerak strategi secara simultan dan berurutan melalui penciptaan barang-barang dan jasa-jasa yang selalu memberi kepuasan kepada konsumen.

C. Konsep Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan.²¹

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus

²¹ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Konsep dan Aplikasinya)*, (Depok: Raja Grafindo, 2014), 7.

dibelanjakan, dari mana sumber uang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.²²

Pengertian lain dari pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana yang diutarakan Nanang Fattah merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.²³

Pembiayaan pendidikan lembaga pendidikan Islam diartikan sebagai pengelolaan atas fungsi-fungsi keuangan lembaga pendidikan Islam. Ini berarti bahwa manajemen dituntut mampu menghimpun dana (*raising of fund*) dan mengalokasikan (*allocation of funds*) dana tersebut, sehingga tujuan perusahaan tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, jika pengertian tersebut diaplikasikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, maka manajemen keuangan atau pembiayaan, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana seorang pemimpin lembaga pendidikan menghimpun dana dan mendistribusikannya, sehingga tujuan lembaga dapat tercapai secara tepat asas dan tepat guna (efektif dan efisien).²⁴

Dari beberapa penjelasan definisi diatas, dapat dipahami bahwa pembiayaan pendidikan merupakan sejumlah investasi yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang, serta bagaimana mendapatkan atau memperoleh dana dan bagaimana dana tersebut bisa dikelola secara efektif dan efisien pada sasaran.

²² Mulvono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogyakarta: Arrus Media, 2016), 77-78.

²³ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), 112.

²⁴ Baharuddin dan Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 116.

2. Urgensi Pembiayaan Pendidikan

Pentingnya anggaran pendidikan sebenarnya telah disadari sebagian pemimpin negeri ini. Sebagian pemimpin tahu masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan, dan kualitas pendidikan salah satunya bergantung pada anggaran. Dengan demikian, sudah seharusnya pemerintah dan para penyelenggara pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan dalam porsi yang cukup, karena mengingat urgensi dan signifikasinya. Di samping itu, hal tersebut juga menjadi cerminan akan kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik, orang tua dan stakeholders.²⁵

Baharuddin dan Moh. Makin melanjutkan, pasca reformasi negeri ini sudah mulai jelas akan menuju kepara era industri, yang mana posisi modal (uang) seakan telah menjadi posisi paling urgen. Keuangan dan pembiayaan, menjadi salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah/madrasa merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah sudah pasti memerlukan biaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreatifitas dan keterampilan pimpinan lembaga untuk menggali sumber-sumber dana serta bisa memanfaatkan secara benar sesuai kebutuhan pondok pesantren. Seperti halnya pondok pesantren Darul Falah Amsilati mengembangkan unit usaha sendiri untuk menghasilkan benefit membantu mengelola pembiayaan pendidikan pondok pesantren.

3. Strategi Pemenuhan Pembiayaan Pendidikan

Strategi pemenuhan pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha-usaha untuk mendapatkan dan menghasilkan uang yang dapat

²⁵ Baharuddin dan Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan...*, 147

dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Strategi pemenuhan pembiayaan bisa dilakukan dengan cara menggali dana dari berbagai sumber. Strategi suatu lembaga pendidikan dalam menggali dana pendidikan secara administratif dengan bagaimana seorang pimpinan melakukan upaya pengelolaan sumber daya dan sumber dana yang terdapat dalam lingkungan suatu lembaga pendidikan. Pengelolaan pendidikan harus mampu berusaha sebaik mungkin dalam mencari pemasukan dana, guna memenuhi kebutuhan dalam pembiayaan pendidikan. Sebagaimana orang-orang terdahulu yang berusaha payah dalam mencari pembiayaan pendidikan.²⁶

Salah satu cara berfikir, yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan (pembiayaan) di lembaga pendidikan adalah kreatif dan dinamis selaras dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan pendidikan. Strategi pemenuhan pembiayaan pendidikan dapat direalisasikan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti berikut;

- a. Melakukan analisis internal dan eksternal terhadap berbagai potensi sumber dana.
- b. Mengidentifikasi, mengelompokkan dan memperkirakan dana yang dapat digali dan dapat dikembangkan.
- c. Menetapkan sumber-sumber pendapatan dana melalui:
 - 1) Musyawarah dengan orang tua siswa baru, pada awal tahun ajaran.
 - 2) Musyawarah dengan para guru untuk mengembangkan koperasi sekolah.²⁷ Dalam hal ini, yang dimaksud peneliti disini ialah hasil dari pengembangan entrepreneurship pondok pesantren.

²⁶ Mukhtar & Iskandar, *Orientasi Baru Supervise Pendidikan*, (Jakarta: Gaung Persada GP Press, 2009), 152.

²⁷ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 23.

- 3) Menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kesenian peserta didik untuk mengumpulkan dana dengan memanfaatkan fasilitas sekolah.

Dengan demikian berdasarkan pemikiran di atas, kemampuan pengelolaan lembaga utamanya kepala sekolah menganalisis semua potensi internal dan eksternal serta menggali kreatifitas dan aktifitas dalam menyusun program sekolah/ madrasah sangat menentukan keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.²⁸

Ada juga sekolah/madrasah yang mengembangkan penggalan dana dalam bentuk :²⁹

- 1) Amal Jariyah
Amal jariyah diwujudkan berupa sumbangan orang tua peserta didik baru. Formulir permintaan sumbangan ini diberikan setelah seorang peserta didik dinyatakan diterima. Sifat amal jariyah ini tidak mengikat, jadi sukarela yang pembayarannya bisa diatur.
- 2) Zakat Mal
Setiap bulan Ramadhan, pihak sekolah/madrasah mengedarkan formulir penyerahan sebagian zakat mal orang tua peserta didik kepada sekolah/madrasah.
- 3) Uang Syukuran
Setiap akhir tahun/kenaikan kelas, orang tua diharapkan bisa mengisi kas sekolah/madrasah secara sukarela, sebagai wujud rasa syukur atas kenaikan putra-putrinya.
- 4) Amal Jum'at
Sebagai salah satu sarana ikhlas setiap hari jum'at pihak sekolah/madrasah bisa membagi-bagikan kotak amal ke kelas-kelas untuk diisi para

²⁸ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi, Implementasi)*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2007), 173.

²⁹ Baharuddin dan Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang; UIN Maliki Press, 2010), 153-154.

peserta didik. Dengan latihan semacam ini, peserta didik terbiasa mengikhhlaskan miliknya untuk kepentingan yang lain. Amal ini bersifat suka rela.

Lembaga pendidikan yang mandiri adalah lembaga yang mampu membiayai semua kebutuhannya secara terus-menerus, memiliki sumber-sumber pembiayaan dan tidak terpengaruh terhadap pada pemenuhan dana dari pemerintah dan lingkungan sekitar. Prof. Slamet mengemukakan bahwa sebuah lembaga yang mandiri dari aspek pembiayaan memiliki indikator sebagai berikut:³⁰

- 1) Memiliki sumber pembiayaan sendiri
- 2) Memiliki biaya operasional secara terus-menerus
- 3) Memiliki invertasi usaha
- 4) Mampu meningkatkan sumber pembiayaan sendiri
- 5) Memiliki pengelolaan pembiayaan yang baik
- 6) Memiliki daya tahan terhadap perubahan zaman.

Berdasarkan penjelasan diatas, lembaga pendidikan yang memiliki sumber pembiayaan sendiri, yang memiliki invertasi usaha yaitu pondok pesantren Darul Falah Amsilati termasuk sebuah lembaga yang mandiri dalam mengelola pembiayaan pada kebutuhan lembaganya. Manajemen pembiayaan pendidikan yaitu kemampuan untuk menghimpun dana (*raising of fund*) dan mengalokasikan dana (*allocation of fund*) tersebut untuk menopang semua kegiatan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan efektif dan efesien.

4. **Konsep Pembiayaan berbasis *entrepreneurship***

Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep *entrepreneurship* pondok pesantren untuk pembiayaan pendidikan dapat dipahami dari pengembangan nilai sosial pada *entrepreneursip*. Yang mana pada awalnya, *entrepreneurship* hanya berorientasi pada *profit* saja tanpa memedulikan orientasi

³⁰ Slamet, *Desentralisasi Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 8.

sosial. Oleh karena itu, *entrepreneurship* dalam pembiayaan pendidikan merupakan jalan tengah untuk mengembangkan aktifitas melalui misi sosial.

Tak dapat dipungkiri, bahwa potensi ekonomi pondok pesantren sangatlah kuat. Salah satunya dari jumlah santri yang banyak, fanatisme alumni dan masyarakat, dan model pengembangan Islami yang berbeda dengan metode konvensional. Jadi jika seluruh kekuatan tersebut digabungkan dengan kemampuan profesionalisme tinggi, bukan hal mustahil seluruh pondok pesantren bisa mandiri dalam aspek ekonomi. Pada batas tertentu pesantren tergolong di antara lembaga pendidikan keagamaan swasta yang *leading*, dalam arti berhasil merintis dan menunjukkan keberdayaan baik dalam hal kemandirian penyelenggaraan maupun pendanaan (*self financing*). Selain menjalankan tugas utamanya sebagai kegiatan pendidikan Islam yang bertujuan regenerasi ulama, pesantren telah menjadi pusat kegiatan pendidikan yang konsisten dan relatif berhasil menanamkan semangat kemandirian, kewirausahaan (*entrepreneurship*), semangat berdikari yang tidak menggantungkan diri kepada orang lain.³¹

Pengembangan ekonomi masyarakat pesantren mempunyai andil besar dalam menggalakkan wirausaha. Di lingkungan pesantren para santri dididik untuk menjadi manusia yang bersikap mandiri dan berjiwa wirausaha.³² Pesantren giat berusaha dan bekerja secara independen tanpa menggantungkan nasib pada orang lain atau lembaga pemerintah swasta. Secara kelembagaan pesantren telah memberikan tauladan, contoh riil (*bi al-haal*) dengan mengaktualisasikan semangat kemandirian melalui usaha-usaha yang konkret dengan didirikannya beberapa unit usaha ekonomi mandiri pesantren. Secara umum pengembangan berbagai usaha ekonomi di pesantren dimaksudkan untuk memperkuat

³¹ Habib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 52.

³² Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 95.

pendanaan pesantren, latihan bagi para santri, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Perubahan dan pengembangan pesantren terus dilakukan, termasuk dalam menerapkan manajemen yang profesional dan aplikatif dalam pengembangannya. Karena istilah manajemen telah membaur ke seluruh sektor kehidupan manusia.³³ Di antara pengembangan yang harus dilakukan pesantren adalah, pengembangan sumber daya manusia pesantren, pengembangan komunikasi pesantren, pengembangan ekonomi pesantren, dan pengembangan teknologi informasi pesantren.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka konsep pembiayaan berbasis *entrepreneurship* pada pondok pesantren dalam kemandirian pembiayaan pendidikan merupakan *social enterprise* dalam pendidikan. Aktivitas *entrepreneurship* dalam makna *social enterprise* ini harus dijalankan dengan misi sosial, tetapi tetap berorientasi pada penghasilan (*profit*).

D. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Kata pondok berasal dari funduq (bahasa arab) yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampung sederhana dari para pelajar/santri yang jauh dari tempat asalnya. Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki kekhasan, keaslian (*indigeneous*) Indonesia. Dengan kemandirian yang dimiliki, pesantren akan menjadi lembaga pendidikan yang otonom, baik dari sistem pembelajaran maupun pendanaan.³⁴ Jadi, pondok pesantren dapat diartikan yaitu tempat tinggal sekaligus tempat para santri menimba ilmu khususnya ilmu agama.

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang

³³ Syamsudduha, *Manajemen Pesantren: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Grha Guru, 2004), 15-16.

³⁴ Irwan, Zain dan Hasse, *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 124.

indigenous. Pendidikan ini muncul sejak abad ke 13. Beberapa abad kemudian penyelenggaraan pendidikan ini semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar (santri), yang kemudian disebut pesantren.³⁵ Pondok pesantren menerapkan prinsip tasamuh (toleran), tawasth wal I'tidal (sederhana), tawazun (penuh pertimbangan), dan ukhuwah (persaudaraan). Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.

Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, ketrampilan, dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.
- b. Mendidik santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh dan dinamis.
- c. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
- d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat sekitar).
- e. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan.
- f. Mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan social masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.

Dengan demikian, pesantren telah terlibat dalam menegakkan negara dan mengisi pembangunan sebagai

³⁵ Sulthon Masyud, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Dipa Pustaka, 2005), 1.

pusat perhatian pemerintah. Hanya saja dalam kaitan dengan peran tradisionalnya, sering diidentifikasi memiliki tiga peran penting dalam masyarakat Indonesia:

- a. Sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional.
- b. Sebagai penjaga dan pemelihara keberlangsungan Islam tradisional.
- c. Sebagai pusat reproduksi ulama.

Lebih dari itu, pesantren tidak hanya memainkan ketiga peran tersebut, tetapi juga menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup dan lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya.⁸ Sebagaimana telah dijelaskan tujuan pesantren, maka kita dapat mengetahui bahwa pesantren bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu agama saja namun lebih jauh lagi para santri dididik dan dibentuk untuk menjadi insan yang paham agama, namun dapat mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat, cerdas dalam ilmu pengetahuan serta dapat menjadi makhluk sosial yang produktif.

2. Unsur-unsur Pondok Pesantren

Unsur-unsur pondok pesantren adalah sebagai berikut :

a. Pondok

Pondok merupakan ciri khas tradisi pesantren dimana para santrinya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai. Asrama atau pondok berada dalam lingkungan komplek pesantren, dimana kyai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang belajar, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Komplek pesantren biasanya dikelilingi oleh tembok agar para santri dapat diawasi keluar dan masuknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Masjid

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren karena masjid merupakan pusat

- pendidikan dalam tradisi pesantren. Masjid ini berfungsi sebagai manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional.
- c. Pengajaran Kitab-kitab Islam Klasik Zaman sekarang kebanyakan pesantren telah memasukan pelajaran pengetahuan umum sebagai suatu bagian penting dalam pendidikan pesantren. Namun, pengajaran kitab-kitab klasik tetap diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren mendidik calon-calon ulama.³⁶
 - d. Santri
Sebuah pesantren tidak dapat dikatakan jika tidak ada santri karena santri merupakan komponen penting untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Menurut tradisi pesantren terdapat dua santri yaitu santri mukim dan santri kalong.
 - e. Kyai
Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Bahkan seringkali kyai merupakan pendiri sebuah pesantren. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata mata bergantung kepada kemampuan pribadi kyainya.

3. Tipe-tipe Pesantren

Secara faktual ada beberapa tipe pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat, yaitu :

a. Pondok Pesantren Tradisional

Pondok pesantren ini masih tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke 15 dengan menggunakan bahasa Arab. Pola pengajarannya dengan menerapkan sistem halaqoh yang dilaksanakan di masjid atau surau. Hakekat dari sistem pengajaran halaqoh adalah penghapalan yang titik akhirnya dari segi metodologi cenderung terciptanya santri yang menerima dan memiliki ilmu.

³⁶ Sulthon Masyhud, dkk, *Tipologi Pondok Pesantren*, (Jakarta: Putra Kencana, 2006), 89.

Artinya ilmu itu tidak berkembang kearah paripurnanya ilmu itu, melainkan hanya terbatas pada apa yang diberikan oleh kiyainya. Kurikulumnya tergantung sepenuhnya kepada para kiyai pengasuh pondoknya. Santrinya ada yang menetap di dalam pondok (santri mukim) dan santri yang tidak menetap di dalam pondok (santri kalong).³⁷ Pada perkembangannya, pondok pesantren tidaklah semata mata tumbuh atas pola lama yang bersifat tradisional melainkan dilakukan suatu inovasi dalam pengembangan suatu sistem. Dengan demikian, agama Islam semakin tersebar sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan pesantren merupakan anak panah penyebaran Islam.

b. Pondok Pesantren Modern

Pondok pesantren ini merupakan pengembangan tipe pesantren karena orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar secara klasik dan meninggalkan sistem belajar tradisional. Penerapan system belajar modern ini terutama nampak pada penggunaan kelas-kelas belajar baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasional. Santrinya ada yang menetap ada yang tersebar di sekitar desa itu. Kedudukan para kyai sebagai koordinator pelaksana proses belajar mengajar.

c. Pondok Pesantren Komprehensif

Pondok pesantren ini disebut komprehensif karena merupakan system pendidikan dan pengajaran gabungan antara pondok pesantren tradisional dengan pondok pesantren modern. Artinya di dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab salaf dengan metode sorogan, bandongan dan wethonan, namun secara reguler system persekolahan terus dikembangkan.

³⁷ Ghazali, Bahri, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), 14.

E. Konsep *Entrepreneurship*

1. Pengertian *Entrepreneurship* (kewirausahaan)

Entrepreneur, berasal dari bahasa Inggris, artinya usahawan atau pengusaha. dalam aktifitas sehari-hari disebut juga dengan pebisnis. *Entrepreneur* berarti orang yang memulai (*The Originator*) sesuatu usaha bisnis baru, yang berupaya memperbaiki sebuah unit keorganisasian melalui serangkaian perubahan-perubahan produktif.³⁸

Kata ini selanjutnya diadopsi ke dalam Bahasa Inggris, *entrepreneur* (*entrepreneurship, entrepreneurial*).³⁹ *Entrepreneur* dalam bahasa Indonesia dalam ejaan-nya yaitu Ke-wirausaha-an, menurut Eko istilah Wirausaha adalah: seseorang yang mampu melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut untuk memulai suatu bisnis yang baru. Atau Kemampuan setiap orang untuk menangkap setiap peluang usaha, dan dimanfaatkannya sebagai lahan usaha, atau bisnis dan seluruh waktunya dicurahkan untuk menemukan peluang-peluang bisnis.⁴⁰

Beberapa pendapat tentang *entrepreneurship* diartikan sebagai adanya suatu kreasi baru dari kegiatan bisnis dengan melalui inovasi, kreatifitas, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi produk yang bernilai. Ronstad mengemukakan:

Entrepreneurship merupakan sebuah proses dinamik di mana orang menciptakan kekayaan inkremental. Kekayaan tersebut diciptakan oleh individu-individu yang menanggung resiko utama, dalam wujud resiko modal, waktu, dan atau komitmen karier dalam hal menyediakan nilai untuk produk atau jasa tertentu.

³⁸ J. Winardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 71.

³⁹ Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan Panduan Bagi Mahasiswa Untuk Mengenal, Memahami, Dan Memasuki Dunia Bisnis*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 23.

⁴⁰ Eko Agus Alfianto, *Kewirausahaan: Sebuah Kajian Pengabdian Kepada Masyarakat, (Dosen Fisip Universitas Yudharta Pasuruan)*, Jurnal Heritage Volume 1 Nomor 2. Januari 2012, diakses tanggal 22 Februari 2017.

Suryana dalam bukunya Yuyun menyebutkan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses.⁴¹ Adapun inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*) melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Lebih sederhana kewirausahaan adalah suatu kemampuan (*ability*) dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar.⁴²

Sedangkan Utsman Najati menerangkan bahwa dalam ajaran Islam sendiri menganjurkan manusia untuk melakukan wirausaha dan selalu mencari karunia Allah di muka bumi.⁴³ Sebagaimana disebutkan dalam hadits, Rasulullah bersabda: “*Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan hasil kerja tangannya. Sesungguhnya Nabi Dawud a.s. makan dari hasil kerja tangannya.*” (H.R. Bukhari).

Seorang *entrepreneur* adalah seorang yang menciptakan sebuah bisnis baru, dengan menghadapi risiko dan ketidakpastian dan yang bertujuan untuk mencapai laba serta pertumbuhan melalui pengidentifikasi peluang-peluang melalui kombinasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan manfaatnya.

Hakikat kewirausahaan merupakan satu upaya memberdayakan potensi ekonomi umat serta membangun sebuah masyarakat yang mandiri. Asumsinya sederhana, kewirausahaan pada dasarnya adalah

⁴¹ Yusus Suryana dan Karyib Bayu, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 24.

⁴² Modul STIE, *Kewirausahaan*, (Yogyakarta: tp, 2002), 2.

⁴³ Utsman Najati, *Belajar EQ dan SQ dari Sunnah Nabi*, (Jakarta: hikmah Press, 2002), 140.

kemandirian, terutama kemandirian ekonomis dan kemandirian pemberdayaan.⁴⁴

Entrepreneurship juga dilihat dari berbagai sudut pandang keilmuan, yaitu:

- a. Menurut ahli ekonomi wirausaha ialah orang yang mengombinasikan faktor-faktor *produksi* untuk meningkatkan nilai sehingga menjadi lebih tinggi dari sebelumnya.
- b. Menurut ahli manajemen wirausaha ialah seorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengombinasikan sumber daya untuk menghasilkan produk, proses produksi, bisnis, dan organisasi usaha baru.
- c. Sedangkan menurut psikologi wirausaha ialah orang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam diri untuk memperoleh suatu tujuan serta bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain.⁴⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *enterpreneurship* adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki tekad, keberanian dan komitmen dalam melahirkan inovasi baru dan memiliki nilai baru baik tujuannya berbentuk profit atau non profit (keuntungan sosial bersama). Menjadi wirausahawan berarti memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan usaha dengan menemukan dan mencari peluang, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dan bertindak secara nyata untuk memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut.

2. Unsur-Unsur Pokok *Entrepreneurship*

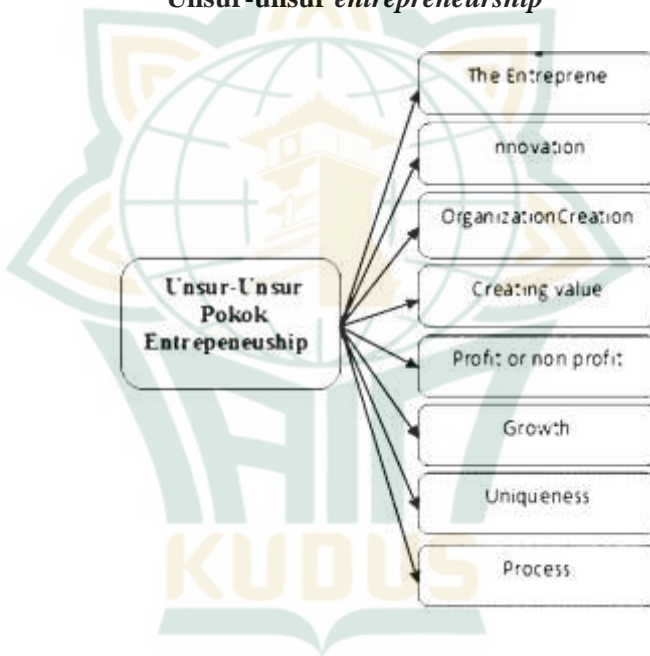
Ada beberapa pendapat tentang proses untuk melahirkan nilai *entrepreneurship*, proses dalam hal ini

⁴⁴ Nanih Machendrawaty dan Agus A. Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam : Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 47.

⁴⁵ Sunarya, dkk., *Kewirausahaan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), 9-10.

terdiri atas sejumlah rangkaian tahapan dalam memunculkan *entrepreneurship*. Pada *entrepreneurship* bukan hanya menekankan pada sesuatu (produk dan jasa) yang baru, unik, dan (yang penting menciptakan) nilai, Coulter menyebutkan dalam bukunya Wiedy Murtini bahwa, dalam *entrepreneurship* justru menekankan pada delapan unsur pokok yang harus ada dalam *entrepreneurship*, yaitu:⁴⁶

Gambar 2.5
Unsur-unsur *entrepreneurship*



Berikut ini penjelasan dari ke delapan unsur yang dikemukakan oleh Coulter, sebagai berikut:

- a. The *entrepreneur* (wirausaha), merupakan unsur pertama yang terpenting dalam kegiatan *entrepreneurship*. Seseorang yang berperan untuk menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

⁴⁶ Wiedy Murtini, *Kewirausahaan Pendekatan Succes Story*, (Surakarta: LPP UNS Press, 2009), 37.

- b. *Inovation* (inovasi), di dalamnya termasuk aktivitas mengganti, merevolusi, mengubah, dan memperkenalkan pendekatan baru.
- c. *Organization creation* (membentuk organisasi), untuk menghasilkan nilai tambah terhadap sesuatu produk atau jasa untuk menjadi sesuatu yang baru harus ada organisasi sebagai penggerak untuk meralisasian tujuan tersebut.
- d. *Creating value* (menghasilkan nilai), melalui entrepreneurship seseorang akan menghasilkan produk baru, pelayanan baru, transaksi, pendekatan baru, sumberdaya dan pemasaran yang diciptakannya sehingga memberikan kontribusi yang bernilai terhadap komunitas dan pasar.
- e. *Profit dan non profit* (laba dan nirbala), tujuan entrepreneursip adalah untuk laba, namun juga sebagai agency pelayanan sosial.
- f. *Growth* (pertumbuhan), yaitu mengejar tumbuhnya entrepreneurship dengan selalu mengejar dan meraih peluang yang ada untuk diraihnya sehingga muncul bisnis baru lagi.
- g. *Uniqueness* (keunikan), termasuk didalamnya membuat kombinasi baru, pendekatan-pendekatan baru yang dilakukan melalui uji coba yang dilakukan, sehingga mempunyai keunikan yang tidak dipunyai oleh orang lain.
- h. *Process* (proses), yaitu serangkain pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus.

Dengan demikian, melalui *entreneursip* suatu produk unik akan diciptakan dan dengan melalui pendekatan-pendekatan yang unik pula. Aktivitas *entrepreneur* tidak hanya proses meniru atau menduplikasi saja tetapi berakhir pada penciptaan sesuatu yang baru dan unik. Akarya cipta yang unik ini merupakan hasil dari proses inovasi yang berkelanjutan atau secara terus menerus yang dilakukan secara terorganisi, sehingga tumbuh dan terus tumbuh kembang, menghasilkan nilai yang mendatangkan laba maupun nirbala.

3. *Entrepreneurship* dalam Perspektif Islam

Islam dan kewirausahaan merupakan dua kosakata yang berbeda. Akan tetapi kewirausahaan dalam perspektif Islam tidak hanya sebatas ringkasan konsep sederhana terkait kewirausahaan dan Islam. Terdapat tiga pilar yang mendukung kewirausahaan yang dilihat dari perspektif Islam.⁴⁷ *Pilar pertama* yaitu mengejar terbukanya peluang yang luas, hal ini mengacu pada konsep kewirausahaan bahwa seorang pelaku usaha adalah yang mengeksplorasi kesempatan melalui penggabungan ulang sumber daya, *Pilar kedua* yaitu sosial ekonomi atau nilai etika. Secara efektif dipandu oleh sekumpulan norma, nilai dan perilaku terpuji. Dan *pilar ketiga* adalah aspek spiritual agama dan hubungan manusia dengan Allah, dengan tujuan utama untuk memuliakan dan mencapai ridha Allah.

Dalam khazanah Islam kata-kata *entrepreneurship* belumlah terlalu populer, namun lebih akrab didengar dengan kata *at-tijaarah* atau pedagang. Padahal profesi ini sudah sangat melekat pada sosok Nabi Muhammad SAW sebagai *entrepreneur* manca negara. Sejarah mencatat bahwa sosok Muhammad adalah pebisnis yang handal jauh sebelum teori-teori bisnis itu ada.⁴⁸ Akan tetapi yang sangat terkenal istilah *entrepreneur* itu dari Barat, sehingga ada tiga dasar pemikiran mengapa rekonstruksi *entrepreneurship* umat Islam menjadi sangat penting, yaitu :⁴⁹

Pertama, umat Islam sejak kelahirannya, memiliki jiwa dan etos kewirausahaan yang tinggi. Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar sahabat adalah para pedagang dan *entrepreneur* manca negara. Proses penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia sampai abad 13 M, dilakukan oleh para pedagang

⁴⁷ Ali Aslan Gumusay, “*Entrepreneurship from an Islamic Perspective*”, dalam *Journal of Business Ethics*, Vol. 130, Nomor 1, 2015, 199-208.

⁴⁸ ⁴⁵Muhammad Syafie Antonio, *Muhammad SAW The Super Manager*, (Jakarta: pro LM & Tazkia Publishibg, 2009), 82.

⁴⁹ Nur Baladina, *Membangun Konsep Entrepreneurship Islam*, (Malang, Ulul Albab Volume 13, No.2 Tahun 2012), 125.

muslim. Masuknya Islam ke Indonesia dan upaya penyebarannya di Asia Tenggara, juga dibawa oleh para pedagang tersebut. Bukti nyata hal ini terlihat bahwa di setiap pesisir pantai Indonesia dan Nusantara penduduknya beragama Islam. Dengan demikian, etos *entrepreneurship* sesungguhnya memang sangat melekat dan inheren dengan diri umat Islam.

Kedua, kondisi ekonomi umat Islam Indonesia sudah sekian lama terpuruk, maka perlu revitalisasi *entrepreneurship* umat Islam. Keprihatinan yang sangat mendalam tentang fenomena kemerosotan umat Islam di bidang ekonomi, Para wiraswastawan di bidang tenun, batik dan lainnya telah mengalami kemunduran karena tidak fit lagi dalam “seleksi alam”, proses perekonomian bangsa yang mengarah pada kapitalisme komparador, dimana terjadi proses alienasi dan deprivatisasi ekonomi rakyat.

Umat Islam sudah sangat letih dihadapkan pada kesulitan ekonomi yang panjang, problem kemiskinan dan keterbelakangan akibat termarginalkan dalam ekonomi dan bisnis. Kinilah saatnya mengembangkan dan membangun pengusaha-pengusaha pemerataan ekonomi yang dicita-citakan oleh umat Islam (pribumi) yang tangguh dalam jumlah besar. Tujuannya untuk mewujudkan cita-cita negara ini. Lebih dari itu, kinilah momentumnya membangun landasan yang kokoh, yakni memperbanyak pilar para pengusaha pribumi itu yang menyangga bangunan ekonomi bangsa.

Ketiga, kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah dewasa ini, hendaknya diimbangi dengan tumbuhnya para *entrepreneur* muslim. Tumbuhnya etos *entrepreneurship* yang tinggi, khususnya bagi generasi umat, akan berdampak positif terhadap kemajuan dan kebangkitan ekonomi umat sebagaimana yang terjadi di masa silam, sekaligus berdampak positif bagi lembaga perbankan dan keuangan itu sendiri. Karena itu, para pengusaha muslim hendaknya dapat memanfaatkan lembaga perbankan dan keuangan tersebut dalam mengembangkan usahanya.

4. Spirit *Entrepreneurship* dalam Islam

Dalam pandangan Islam, tahapan proses pengelolaan suatu usaha diniatkan sebagai ibadah yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan hidup dan setiap tahapannya mampu memegang esensi spiritualitas Islam. Hal ini sangat jauh bertolak belakang jika kita melihat kewirausahaan secara konvensional yang mengedepankan pencapaian keuntungan setinggi-tingginya bahkan tanpa memandang nilai etis dari setiap tahapan proses berwirausaha.⁵⁰

Salah satu Asmaul Husna Allah SWT adalah *Ar Razzaq* (Yang Maha Pemberi Rizki). Kata *rizq*, menurut M. Dawam Rahardjo dalam ulasan Ensiklopedisnya tentang *rizq*, dengan segala variasinya, disebut Al-Qur'an sebanyak 112 kali dalam 41 surat.⁵¹

Digabungkan dengan dengan doktrin-doktrin Islam yang lain (amal, ma'isyah, tijarah, barakah, shadakah, shariah, dan bahkan riba), konsep *rizq* berkaitan erat dengan konsep "kerja keras" dan "tak kenal menyerah". Dialah Allah SWT yang menentukan rizki bagi hambaNya. Jadi rizki itu datang atau hilang, semuanya atas kehendaknya, bukan karena yang lainnya. Maka dari itu, sebenarnya tidak ada istilah kesialan atau "bernasib sedang mujur" pada diri seseorang. Karena Dia memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki atau mencabutnya atas kehendak-Nya pula. Namun Allah SWT tidak begitu saja memberikannya kepada hamba tanpa adanya sebab yang mendatangkannya. Walaupun secara asasi manusia telah dijamin kehidupannya oleh Allah SWT, baik diminta atau tidak, muslim maupun kafir.

Islam telah memberikan jalan untuk membuka pintu-pintu rizki itu, yakni dengan memupuk sifat, ciri, dan watak yang harus dimiliki seseorang muslim untuk diwujudkan dari gagasan inovatif ke dalam dunia

⁵⁰ Hanifiyah Yuliatul Hijriah, *Spiritual Islam dalam Berwirausahaan* : dalam *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah*, (Surabaya, Universitas Erlangga, 2016), Vol. 12, No. 1, Mei 2016, 192.

⁵¹ Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 578.

nyata secara kreatif atau lebih dikenal “mutiara kegiatan kewirausahaan” (*entrepreneurship*). Semangat kerja keras ini banyak dikutip dalam pepatah pribahasa Arab yang mengatakan bahwa :

لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ السَّمَاءَ لَا تُمْطِرُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً

Artinya: “langit tidak menurunkan emas dan perak”

Dimensi spritualitas Islam pelaku usaha dalam sebuah kewirausahaan menjadi poin penting, di mana pelaku usaha sebagai pemegang kendali bagi jalan dan tumbuh kembang bisnis tersebut, khususnya dalam menggapai bisnis yang berkelanjutan. Potensi ini dapat tergali melalui kecerdasan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Kecerdasan ataupun akal manusia tidak hanya dapat dimanfaatkan sebatas kecerdasan intelektual semata namun juga dalam bentuk kecerdasan spiritual Islam.⁵²

Ajaran Islam sangat mendorong *entrepreneurship* pada umatnya. Oleh karena itu bagi seorang muslim, jiwa *entrepreneurship* tersebut seharusnya sudah menjadi bagian dari hidupnya. Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar bekerja dan beramal, sebagaimana disebutkan dalam al Quran, dalam surah at-Taubah: 105 yaitu :⁵³

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga

⁵² Hanifiyah Yuliatul Hijriah, *Spiritual Islam dalam Berwirausahaan* : dalam *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah*, (Surabaya, Universitas Erlangga, 2016), Vol. 12, No. 1, Mei 2016. 193

⁵³ Syaamil, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 203.

Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS at-Taubah: 105).

Dan masih banyak lagi hadits Nabi yang mendorong pengembangan semangat *entrepreneurship*, seperti *”Hendaklah kamu berdagang, karena didalamnya terdapat 90 persen pintu rezeki”*(HR Ahmad). *”Sesungguhnya sebaik-baik mata pencaharian adalah seorang pedagang (entrepreneur)”* (HR Baihaqy).⁵⁴

Nilai-nilai Islami menjiwai atau menjadi spirit kewirausahaan umat Islam, Kewirausahaan sebagai pilar kemandirian umat mengakar dalam nilai-nilai keislamannya. Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna telah mengajarkan konsep-konsep unggul lebih dulu dari Protestan, akan tetapi para pengikutnya kurang memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam sebagaimana mestinya. Umat Islam seharusnya dapat menggali *inner dynamics* sistem etika yang berakar dalam pola keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip bisnis modern yang dipraktekkan perusahaan-perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

5. Prinsip-prinsip *Entrepreneurship* dalam Islam

Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna telah mengajarkan konsep-konsep unggul terlebih dahulu, akan tetapi para pengikutnya kurang memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam sebagaimana mestinya. Umat Islam seharusnya dapat menggali *inner dynamics* sistem

⁵⁴ Suyanto, *Spirit Kewirausahaan “Muslim” dalam Upaya Membangun Kemandirian Umat*, (Welfare, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol.2, No.1, Juni 2013)

etika yang berakar dalam pola keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip bisnis modern yang dipraktekkan perusahaan-perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perusahaan-perusahaan besar dunia telah menyadari perlunya prinsip-prinsip bisnis yang lebih manusiawi seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu.⁵⁵

a. *Customer Oriented* (Kepuasan Pelanggan)

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip *customer oriented*, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dampak dari prinsip yang diterapkan, para pelanggan Rasulullah SAW tidak pernah merasa dirugikan. Tidak ada keluhan tentang janji-janji yang diucapkan, karena barang-barang yang disepakati dalam kontrak tidak ada yang dimanipulasi atau dikurangi.

Untuk memuaskan pelanggan ada beberapa hal yang selalu Nabi perintahkan. Beberapa hal tersebut antara lain, adil dalam menimbang, menunjukkan cacat barang yang diperjual belikan, menjauhi sumpah dalam jual beli dan tidak mempraktekkan apa yang disebut dengan *bai' Najasy* yaitu memuji dan mengemukakan keunggulan barang padahal mutunya tidak sebaik yang dipromosikan, hal ini juga berarti membohongi pembeli.

Selain itu prinsip *customer oriented* juga memberikan kebolehan kepada konsumen atas

⁵⁵ Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif), Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Samarinda, jurnal al-Tijary, Vol. 01, No. 01, Desember 2015.

hak *Khiyar* (meneruskan atau membatalkan transaksi) jika ada indikasi penipuan atau merasa dirugikan.⁵⁶ Konsep *Khiyar* ini dapat menjadi faktor untuk menguatkan posisi konsumen di mata produsen, sehingga produsen atau perusahaan manapun tidak dapat berbuat semena-mena terhadap pelanggannya.

b. *Transparansi* (terbuka)

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. *Transparansi* terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen.

Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya. *Transparansi* baik dalam laporan keuangan, maupun laporan lain yang relevan.

c. *Persaingan yang Sehat*

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya.

Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena

⁵⁶ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2010), 215.

merupakan perbuatan dosa yang harus di jauhi. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

d. Fairness

Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para Rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan. Keadilan kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Wujud dari keadilan bagi karyawan adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak mengeksploitasinya dan menjaga hak-haknya.

6. Konsep *Entrepreneurship* dalam Pondok Pesantren

a. Tipologi Pondok Pesantren

Dalam perkembangannya hingga kini, pesantren sebagai tempat para santri menuntut ilmu setidaknya telah dibuat tipologinya menjadi dua kelompok. Pertama, tipologi pesantren dibuat berdasarkan elemen yang dimiliki. Kedua, tipologi pesantren

didasarkan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakannya.⁵⁷ Dengan mendasarkan kepada elemen yang dimiliki, Ziemek berkesimpulan bahwa pesantren pada akhir abad ke 20 M ini dapat dibedakan menjadi lima tipologi. Sebagaimana disebutkan dalam buku Ali Anwar :

Pola pertama, terdiri dari masjid dan rumah kyai. Pondok pesantren seperti ini masih bersifat sederhana, di mana kyai mempergunakan masjid atau rumahnya sendiri untuk tempat mengajar. Dalam pondok pesantren tipe ini santri hanya datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri. Pesantren jenis ini khas untuk kaum sufi (pesantren tarekat) yang memberikan pengajaran bagi anggota tarekat. Pesantren ini merupakan pesantren paling sederhana yang hanya mengajarkan kitab dan sekaligus merupakan tingkat awal mendirikan pesantren.

Pola kedua, terdiri dari masjid, rumah kyai, dan pondok menginap para santri yang datang dari daerah yang jauh. Pesantren ini memiliki semua komponen yang dimiliki pesantren “klasik”, seperti masjid dan tempat belajar yang terpisah dari pondokan.

Pola ketiga, terdiri dari masjid rumah kyai dan pondok dengan pembelajaran sistem wetonan dan sorongan, pondok pesantren tipe ketiga ini telah menyelenggarakan pendidikan formal seperti madrasah yang memberikan pelajaran umum dan berorientasi pada sekolah-sekolah pemerintah.

Pola keempat, pondok pesantren tipe ini selain memiliki komponen-komponen fisik seperti pola ketiga, memiliki lahan pertanian, kebun, empang, dan perternakan dan juga menyelenggarakan kursus-kursus teknik pertanian dan lainnya, seperti menjahit, elektro yang sederhana, perbengkelan dan pertukangan kayu. Pesantren tipe ini juga memiliki pula tempat untuk pendidikan keterampilan seperti

⁵⁷ Ali Anwar, *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 14.

kerajinan, perbengkalan, toko koperasi, sawah, ladang, dan sebagainya.

Pola kelima, pondok pesantren yang telah berkembang dan bisa disebut pondok pesantren modern. Di samping masjid, rumah kyai/asatidz, pondok, madrasah dan atau sekolah umum, terdapat pula bangunan-bangunan fisik lain seperti: 1) perpustakaan, 2) dapur umum, 3) ruang makan, 4) kantor administrasi, 5) toko, 6) rumah penginapan tamu (orang tua santri atau tamu umum), 7) ruang operation dan sebagainya.

Jenis pesantren kelima adalah pesantren yang memiliki komponen pesantren klasik yang dilengkapi dengan sekolah formal mulai SD sampai Universitas. Seperti pesantren keempat, jenis ini memiliki program keterampilan dan usaha-usaha pertanian dan kerajinan termasuk di dalamnya memiliki fungsi mengelola pendapatan, seperti koperasi, perikanan dll. Program-program pendidikan yang berorientasi pada lingkungan mendapat prioritas, di mana pesantren mengambil prakarsa dan mengarahkan kelompok-kelompok swadaya di lingkungannya.

Tipologi yang diajukan oleh Ziemek itu diikuti oleh Endang Soetari AD dan Ridlwan Nasir. Dengan mendasarkan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan, kini pesantren dibedakan menjadi tiga atau dua tipologi. Abd Muin dkk, misalnya membagi pesantren ke dalam tiga tipologi, yaitu salafiyah, khalafiyah, kombinasi. Sedangkan Husni Ra'im, Abd. Rahman Assegaf, dan Wardi Bakhriar membagi pesantren ke dalam dua tipologi, salafiyah dan khalafiyah.⁵⁸

Pesantren Salafiyah, menurut Husni Rahim adalah pesantren yang menyelenggarakan sistem pendidikan Islam non-klasikal dengan metode bandongan dan sorongan dalam mengkaji kitab-kitab

⁵⁸ Ali Anwar, *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, 25-26.

klasik (kuning) yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama pada abad pertengahan. Sedangkan pesantren khalafiyah adalah pesantren yang telah mengadopsi sistem pendidikan klasikal dengan kurikulum tertata, mengintegrasikan pengetahuan umum.⁵⁹

Assegaf berpendapat bahwa ciri pesantren salafiyah adalah non-klasikal, tradisional dan mengajarkan murni agama Islam, sedangkan pesantren yang berpola khalafiyah mempunyai lembaga pendidikan klasikal, modern, dan memasukkan mata pelajaran umum dalam madrasah yang dikembangkannya.

Aktivitas pesantren tradisional difokuskan pada *tafaqquh fi ad-dhin*, yakni pendalaman pengalaman, perluasan, dan penguasaan khazanah ajaran Islam. Sedangkan pesantren yang telah memasukkan pelajaran umum di madrasah yang dikembangkannya atau membuka sekolah umum, dan tidak hanya mengajarkan kitab Islam klasik, disebut dengan pesantren khalafiyah atau modern.⁶⁰

Begitu juga Ali Anwar menambahkan tipologi yang digunakan oleh Departemen Agama yang membagi pesantren ke dalam tiga tipologi, yaitu salafiyah, khalafiyah, atau asriyah, dan kombinasi. Pesantren salafiyah diberi batasan dengan menyelenggarakan atau mengutamakan pengajian kitab dan tidak menyelenggarakan pendidikan formal. Pesantren khalafiyah asriyah adalah pesantren yang hanya menyelenggarakan atau mengutamakan pendidikan formal. Sedangkan pesantren kombinasi yang menyelenggarakan pendidikan formal dan pengajian kitab. Sayangnya, Departemen Agama ternyata hanya membagi tipologi santri ke dalam dua macam, yaitu santri yang hanya mengaji dan santri yang di samping mengaji juga sekolah.

⁵⁹ Ali Anwar, *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren*, 26.

⁶⁰ Ali Anwar, *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren*, 26.

Bedasarkan pembagian tipologi pondok pesantren di atas, dalam penelitian ini tipologi pondok pesantren yang diajukan oleh Ziemek seperti dijelaskan di atas tampaknya lebih tepat dan cocok. pondok pesantren Darul Falah Amtsilati termasuk tipologi keempat, meskipun jumlah santrinya masih sedikit tetapi program kegiatan selain tipologi pondok pesantren ketiga yang memberikan pelajaran umum dan klasik juga menerapkan olahan pisik (*entrepreneurship*) yaitu perikanan dan pertanian. Dalam hal ini juga, peneliti mengutip perkataan yakub dalam bukunya menyatakan, “Kendati pondok pesantren secara implisit berkonotasi sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, tidaklah berarti seluruh pesantren itu selalu tertutup dengan inovasi.”⁶¹

Pada dasarnya, pesantren itu adalah hasil usaha mandiri kiai yang dibantu santri dan masyarakat, sehingga memiliki berbagai bentuk. Selama ini belum pernah terjadi, dan barangkali cukup sulit terjadi penyeragaman pesantren dalam skala nasional. Setiap pesantren memiliki ciri khusus akibat perbedaan selera kiai dan keadaan sosial budaya maupun sosial geografis yang mengelilinginya.⁶²

b. Fungsi dan Peranan Pondok Pesantren

Sejak berdirinya pada abad yang sama dengan masuknya Islam hingga sekarang, pesantren telah berkumpul dengan masyarakat luas. Pesantren telah berpengalaman menghadapi berbagai corak masyarakat dalam rentang waktu itu. Pesantren tumbuh atas dukungan mereka, bahkan menurut Husni Rahim, pesantren berdiri didorong permintaan (*demand*) dan kebutuhan (*need*) masyarakat, sehingga pesantren memiliki fungsi yang jelas.

⁶¹ Yacub, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung, Percetakan Angkasa, 1993), 63.

⁶² Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 16.

Fungsi pesantren pada awal berdirinya sampai dengan kurun sekarang telah mengalami perkembangan. Visi, posisi, dan persepsinya terhadap dunia luar telah berubah. Laporan Syarif dkk, menyebutkan bahwa pesantren pada masa yang paling awal (masa Syekh Maulana Malik Ibrahim) berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Kedua fungsi ini bergerak saling menunjang. Pendidikan dapat dijadikan bekal dalam memandangkan dakwah sedang dakwah bisa dimanfaatkan sebagai sarana dalam membangun sistem pendidikan. Jika ditelusuri akar sejarah berdirinya sebagai kelanjutan dari pengembangan dakwah, sebenarnya fungsi edukatif pesantren adalah sekadar membonceng misi dakwah. Misi dakwah Islamiyah inilah yang mengakibatkan terbangunnya sistem pendidikan. Pada masa wali songo, unsur dakwah lebih dominan dibanding unsur pendidikan. Saridjo dkk mencatat, bahwa fungsi pesantren pada kurun wali songo adalah sebagai pencetak calon ulama dan mubaligh yang militan dalam menyiarkan agama Islam.⁶³

Sebagai lembaga dakwah, pesantren berusaha mendekati masyarakat. Pesantren bekerja sama dengan mereka dalam mewujudkan pembangunan. Sejak semula pesantren terlibat aktif dalam mobilisasi pembangunan sosial masyarakat desa. Oleh karena itu, menurut Ma'shum, fungsi pesantren semula mencakup tiga aspek yaitu fungsi religius (*diniyyah*), fungsi sosial (*ijtimiyah*), dan fungsi edukasi (*tarbawiyah*).⁶⁴ Ketiga fungsi ini masih berlangsung hingga sekarang.

Pesantren selain sebagai lembaga pendidikan, pembinaan moral dan kultural, baik di kalangan para santri maupun santri dengan masyarakat, pondok

⁶³ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, 22-23.

⁶⁴ Ali Ma'shum, *Ajakan Suci*, (t.tp, LTN-NU DIY,1995), 119.

pesantren juga sebagai lembaga yang melatih kemandirian santri dalam menghasilkan karya atau kemandirin dalam mengembangkan unit usaha jika pondok pesantren memiliki tipologi pondok demikian.

Suhartini menyebutkan, pesantren dengan berbagai harapan dan predikat yang dilekatkan kepadanya, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama yang senantiasa diembannya, yaitu: (1) sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*centre of excellence*), (2) sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*), (3) sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).⁶⁵ Selain ketiga fungsi tersebut pesantren juga dipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*social change*) di tengah perubahan yang terjadi.

Dalam keterlibatannya dengan peran, fungsi, dan perubahan yang dimaksud, pesantren memegang peranan kunci sebagai motivator, inovator, dan dinamisator masyarakat. Hubungan interaksionis-kultural antara pesantren dengan masyarakat menjadikan keberadaan dan kehadiran institusi pesantren dalam perubahan dan pemberdayaan masyarakat menjadi semakin kuat. Namun demikian harus diakui, belum semua potensi besar yang dimiliki pesantren tersebut dimanfaatkan secara maksimal, terutama yang terkait dengan kontribusi pesantren dalam pemecahan masalah-masalah sosial ekonomi umat.

c. Strategi Pengembangan *Entrepreneurship* Pesantren dalam Pembiayaan Pendidikan

Ide pengembangan pondok pesantren dalam bidang ekonomi seyogyanya memiliki dua konotasi makna: *pertama*, pesantren sebagai lembaga

⁶⁵ Suhartini, *Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren*, dalam A. Halim et. al. (eds). *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 233.

pengembangan ekonomi masyarakat. *Kedua*, pesantren memiliki resource ekonomi sendiri dalam upaya mengelola dan mengembangkan pondok pesantren. Pada konotasi pertama, Aziz mengatakan bahwa peran pesantren untuk menjadi pioner bagi ekonomi masyarakat menengah yang memiliki akses lebih sedikit dikalangan birokrasi pemerintah. menurutnya, pesantren harus memiliki SDM yang mumpuni untuk dapat mengadvokasi para ekonomi kecil menengah.⁶⁶ Sedangkan konotasi yang kedua, yakni pesantren adalah lembaga pendidikan yang tidak bergantung pada bantuan masyarakat dan pemerintah.

Pengembangan aktivitas *entrepreneurship* di pesantren telah berkembang dari berbagai jenis aktivitas dari unit usaha kecil sampai unit usaha besar dengan berbagai variasi yang diinginkan dalam *entrepreneurship* pondok pesantrennya. Semua aktivitas *entrepreneurship* itu sesuai potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki oleh pondok pesantren.

Menurut Clarence Danhof, bahwa *entrepreneurship* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) *Innovating entrepreneurship*, yakni *entrepreneurship* dengan mengumpulkan informasi secara agresif dari berbagai produksi disertai terhadap capaian dari masing-masing produksi dengan membuat kombinasi-kombinasi dari inovasi baru.
- 2) *Imitative entrepreneurship*, yakni *entrepreneurship* yang hanya meniru dan menerapkan inovasi-inovasi yang berhasil diterapkan para *Innovating entrepreneurship*.
- 3) *Focus entrepreneurship*, yakni *entrepreneurship* yang teramat berhati-hati dan skeptis terhadap berbagai inovasi,

⁶⁶ Moh. Ali Azizi, “*Pesantren dan Pengembangan Masyarakat*” dalam Abd. Halim, Manajemen Pesantren, (Jogjakarta: LKSI, 2005), 210.

namun setelah yakin keberhasilan inovasi yang ada ia akan segera meniru dan menerapkan inovasi tersebut.

- 4) *Drone entrepreneurship*, yaitu *entrepreneurship* yang menolak sama sekali memanfaatkan peluang inovasi. Sekalipun penolakan itu berkaitan terhadap kerugian dibandingkan produsen yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jenis aktivitas *entrepreneurship* dapat berupa inovasi dan kreasi orsinil yang benar-benar baru, meniru dari yang telah ada, atau analisis dari berbagai kegiatan inovasi yang telah ada. Pilihan terhadap berbagai model tersebut tentu saja berpengaruh pada kualitas dan nilai *entrepreneurship* yang dilakukan. Mursyid menyebutkan, ada empat pola usaha ekonomi di pesantren yang banyak terjadi dalam pengembangan unit usaha perekonomian pesantren, yaitu:⁶⁷

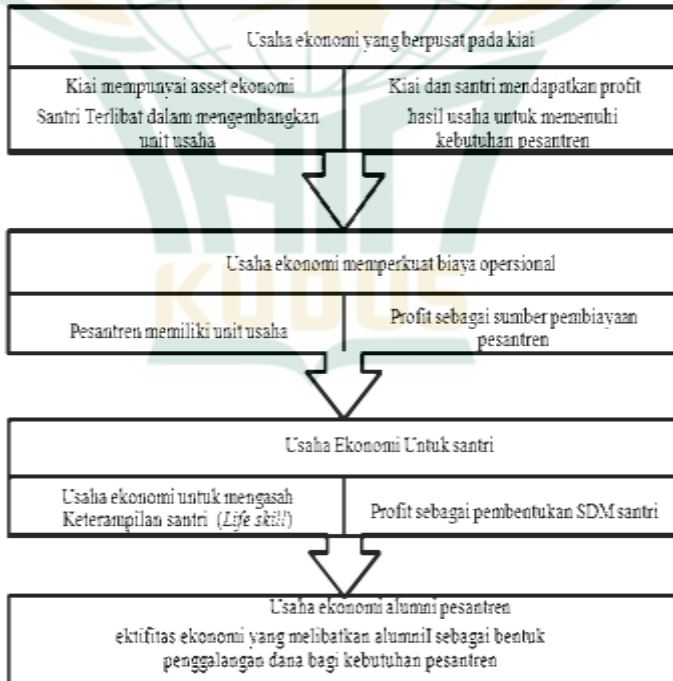
1. Usaha ekonomi yang berpusat pada kiai sebagai orang yang bertanggungjawab di pesantren. Dimana para kiai mempunyai asset ekonomi seperti kebun atau sawah yang luas, kemudian santri dilibatkan dalam pengelolaan dari menanam, merawat, dan panen. Dari hasil usaha tersebut kiai mendapat keuntungan tenaga dari santri dan para santri juga mendapat keuntungan tambahan penghasilan. Hasil usaha ini kemudian digunakan kiai untuk membiayai kebutuhan pengembangan pesantren.
2. Usaha ekonomi untuk memperkuat biaya operasional pesantren. Yakni adanya unit-unit ekonomi yang dimiliki pesantren yang hasil usahanya digunakan untuk membiayai pesantren itu sendiri. Unit usaha pesantren menjadi sumber pembiayaan pesantren, sehingga seluruh biaya operasional pesantren atau sebagiannya dapat dipenuhi dari hasil ekonomi tersebut.

⁶⁷ Mursyid, *Dinamika Pesantren dalam Perspektif Ekonomi*, dalam (Jurnal Studi Agama Millah, Volume XI, Nomor 1 Agustus 2011), Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam Indonesia, 2011, hlm. 180-181.

3. Usaha ekonomi untuk santri dengan memberi keterampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak dapat dimanfaatkan selepas dari pesantren. Usaha ekonomi dalam hal ini berupa sarana pendidikan *life skill* bagi santri (yang terkadang tidak berorientasi profit) agar menjadi bagian sistem pendidikan integral di pesantren.
4. Usaha ekonomi bagi alumni pesantren. Usaha ekonomi jenis ini ialah aktifitas ekonomi yang melibatkan alumni pesantren sebagai bagian penggalangan dana bagi santri dan pesantren. Namun prioritas usahanya tetaplah pada pemberdayaan alumni pesantren.

Kerangka pemikiran secara skematis 4 pola usaha ekonomi di pesantren dalam mengembangkan unit usahanya dapat dilihat pada skema berikut ini:

Gambar 2.6.
Pola Usaha ekonomi Pesantren



Berdasarkan skema pola usaha ekonomi pesantren di atas, menunjukkan bahwa pola wirausaha pada setiap lembaga pesantren berbeda-beda tergantung bagaimana konseptual perencanaan wirausahaanya. Pilihan terhadap berbagai model tersebut tentu saja berpengaruh pada kualitas dan nilai yang dihasilkan dari *entrepreneurship*.

7. Proses Implikasi Manajemen *Entrepreneurship* Terhadap Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Entrepreneurship memiliki konsep yang bagus untuk menghasilkan nilai atau menumbuhkan usaha, dan bisa menghasilkan kualitas yang bagus dengan bertujuan pada profit pondok pesantren. Melalui aktivitas *entrepreneurship*, pesantren dapat memaksimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya untuk memperoleh berbagai keuntungan finansial. Melalui keuntungan finansial tersebut pesantren dapat membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikannya.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Nurmasiythah, tesis dengan judul “Manajemen Berbasis *Entrepreneurship* untuk Mengelola Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)”, Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, tahun 2017. Pada penelitian ini persamaannya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu Penelitian sama-sama mengarahkan pada aktivitas manajemen *entrepreneurship* dan peran nyata dalam dunia pendidikan. Perbedaannya yaitu, pada penelitian ini meneliti hanya fokus pada kegiatan koperasi dan unit usaha, sedangkan pada penelitian yang sedang diteliti, fokus terhadap model tabungan santri.⁶⁸

⁶⁸ Nurmasiythah, “Manajemen Berbasis *Entrepreneurship* untuk Mengelola Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan

Kedua, Muhammad Iqbal Fasa, tesis dengan judul “Manajemen Unit Usaha Pesantren (Studi Kasus Pondok Modern Darussalam Gontor I Ponorogo Jawa Timur)”, Program Magister Ekonomi Islam, tahun 2014. Pada penelitian ini persamaannya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu Penelitian ini mengarahkan pada pengelolaan unit usaha untuk menunjang kemandirian pondok. Perbedaannya yaitu, Temuan berbeda Spirit *entrepreneurship* yang berasal dari nilai khas pesantren.⁶⁹

Ketiga, Jurnal Penelitian oleh Eko Mardiyanto dari STAI Al Azhar, Menganti Gresik dengan judul “Manajemen Kewirausahaan Pondok Pesantren Berbasis Agrobisnis (Studi Kasus di PP Mukmin Mandiri dan PP Nurul Karomah)”, Penelitian ini sama-sama mengarahkan pada aktivitas manajemen *entrepreneurship* dan peran nyata dalam dunia pendidikan terutama dalam bidang Agrobisnis, perbedaannya Pembahasannya lebih diarahkan pada usaha Agrobisnis saja yang menjadi penggerak ekonomi bagi pembiayaan pesantren dan tidak mengarah kepada usaha-usaha lainnya.⁷⁰

Keempat, Jurnal Penelitian oleh Achmad Anwar Abidin dari STAI Daruttaqwa Gresik dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah di Surabaya)”, Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang manajemen pembiayaan bagi lembaga untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, perbedaannya penelitian ini tidak menyinggung pada kegiatan *entrepreneurship* akan tetapi lebih mengarah pada sumber dana yang sudah ada pada lembaga untuk penggunaan yang efektif dan efisien.⁷¹

Jawa Timur)”, Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

⁶⁹ Muhammad Iqbal Fasa, “Manajemen Unit Usaha Pesantren (Studi Kasus Pondok Modern Darussalam Gontor I Ponorogo Jawa Timur)”, Program Magister Ekonomi Islam (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2014).

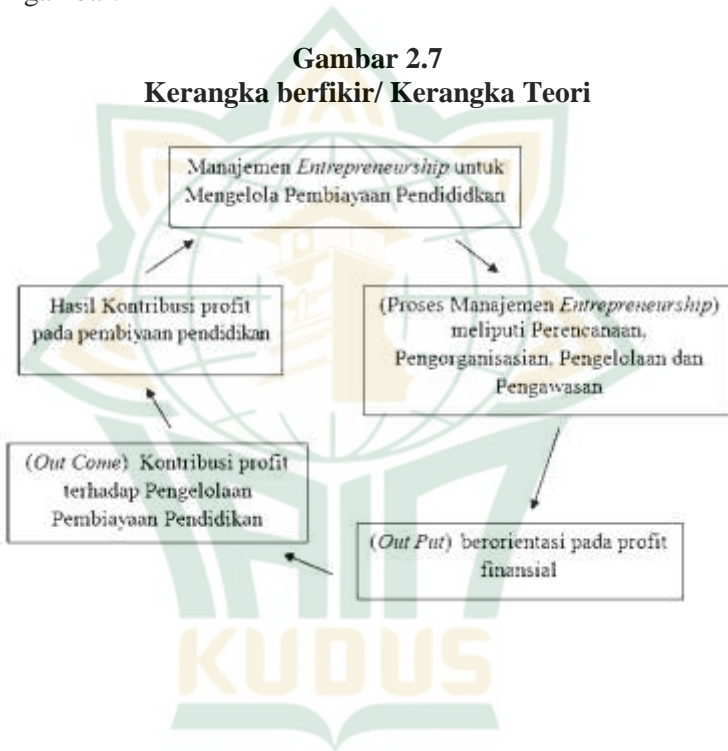
⁷⁰ Eko Mardiyanto, “Manajemen Kewirausahaan Pondok Pesantren Berbasis Agrobisnis (Studi Kasus di PP Mukmin Mandiri dan PP Nurul Karomah)”, Jurnal Fikroh, Vol. 9 No. 2 (2016), ISSN: 2715-4459.

⁷¹ Achmad Anwar Abidin, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta

G. Kerangka berfikir/ Kerangka Teori

Kerangka berfikir merupakan suatu bentuk dari keseluruhan proses penelitian di mana kerangka berfikir menerangkan mengapa dilakukan penelitian (latar belakang masalah), bagaimana proses penelitian (pemecahan masalah), apa yang diperoleh dari penelitian, untuk apa hasil penelitian diperoleh. Berikut kami paparkan kerangka berfikir pada gambar:

Gambar 2.7
Kerangka berfikir/ Kerangka Teori



Menengah di Surabaya)”Jurnal Penjaminan Mutu , Vol. 9 No. 2 (2017), ISSN: 2548-3110.